



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya secara terperinci, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, sebenarnya para ulama sepakat dan setuju dengan dikeluarkannya fatwa tersebut. Namun, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya. *Pertama*, dengan samanya pengertian hubungan nasab dan hubungan perdata, berarti MUI tidak menentang putusan MK melainkan memperjelas putusan MK yang masih umum. *Kedua*, dalil yang digunakan untuk wasiat wajibah masih dijadikan

perdebatan dikalangan para ulama, maka seharusnya bukan wasiat wajibah yang digunakan melainkan cukup dengan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. *Ketiga*, takzir tidak seharusnya bagi pelaku zina karena takzir hanya untuk kejahatan yang tidak ada hududnya.

2. Sedangkan pendapat mereka mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina mereka sepakat dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung jawab. Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini diaplikasikan pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak MUI disamping memahami hadits yang dijadikan landasan dikeluarkannya fatwa secara tekstual harusnya juga dengan kontekstual, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan demikian juga dengan wasiat wajibah yang digunakan oleh MUI seharusnya menggunakan dalil yang sudah disepakati oleh para ulama.
2. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pembaca pada khususnya, hendaklah memposisikan anak hasil zina sebagaimana anak lainnya. Yang membedakan hanyalah mereka tidak memiliki hubungan nasab, waris dan perwalian terhadap ayah biologisnya.